

Perizinan KEK Maloy Diberi Waktu 5 Bulan, Bakal Dicabut Karena Tak Ada Investasi



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,27/02/2024

SANGATTA, TRIBUN - Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Maloy yang berada di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur hingga saat ini belum berjalan. Hal itu disebabkan perizinan penggunaan Pelabuhan KEK Maloy yang belum terbit dan beberapa infrastruktur ada yang belum terpenuhi.

Oleh sebab itu, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman diberi waktu selama 5 bulan ke depan, termasuk bulan ini untuk melengkapi kebutuhan dasar KEK Maloy.

“Kami akan mengejar semuanya hingga bulan Juni, saat ini beliau (Pj Gubernur Kaltim) akan menjembatani agar bulan April nanti ada dari Kementerian yang bisa mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus satu di Kutai Timur itu, Senin (26/2).

Pasalnya, jika hal itu tidak dilakukan, KEK Maloy terancam dicabut oleh Pemerintah Pusat karena tidak ada investasi yang tumbuh dan serapan tenaga kerja yang tidak maksimal. Kendati demikian, pihaknya terus berusaha agar KEK Maloy tidak dicabut sehingga akan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Kutai Timur.

Sementara itu, ditambahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutim, Rizali Hadi bahwa saat ini, perizinan yang masih terkendala di Kementerian Perhubungan kurangnya dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH).

“Ini ranahnya provinsi, jadi kami arahkan ke Kepala Dinas DPMPTSP untuk banyak berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim. Datanya dari kami pihak provinsi yang membawa ke pusat,” ucapnya.

“Dengan selesainya permasalahan ini, lebih banyak investor yang masuk ke KEK nantinya,” pungkasnya.

Sebelumnya, percepatan izin operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dipercepat untuk menarik investasi segera masuk.

Memang dalam perjalanannya ternyata diperoleh kendala perizinan yang belum *running* di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), KLHK, dan Kementerian Perhubungan. Direktur Utama Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS), Aji Abidharta Hakim menjelaskan hasil pertemuan Menko Perekonomian RI khususnya Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Presiden Joko Widodo dikatakan pihak Perusda MBS sedang mengevaluasi seluruh *project* KEK mana saja yang dianggap jalan di tempat. Ada 20 KEK dievaluasi, termasuk KEK MBTK.

Dewan KEK ingin melihat keseriusan dalam pengelolaan kawasan khusus tersebut sehingga bisa *running* dan ada investor masuk.

"Kita sampaikan di sana kendala-kendalanya, permasalahan yang dihadapi cenderung investasi yang tidak tumbuh dan serapan tenaga kerja, ini yang ingin dilihat Dewan KEK," kata Abi, Kamis (22/2).

Komunikasi dengan investor telah dilakukan, sejatinya ada dua poin yang menjadi garis besar, kendala yang dihadapi pengelola. Pertama, PT MBTK tak memiliki akses kuat karena dimiliki Pemkab Kutim dan Pemprov Kaltim, sehingga keterbatasan pengelolaan terjadi.

"PT MBTK ditunjuk pengelola KEK Maloy, tetapi akses terkait aset tidak kuat, makanya percepatan menjadi BUMD, nantinya menjadi *power*, dan akses untuk kelola aset yang menjadi penyertaan modal," ujarnya Abi.

Kedua, investor melihat peran pelabuhan di KEK Maloy. Sampai sejauh ini, proses perizinan permanen belum terbit. Saat ini Kementerian Perhubungan ingin diselesaikan dan segera diajukan. Pengelola pelabuhan KEK MBTK memang sedang *running* dan sedang berproses di tiga kementerian terkait melalui Dinas Perhubungan Kaltim.

Investor ingin mendapat kepastian siapa pengelolanya. Sehingga ada nilai tambah dan otomatis syarat investasi serta tenaga kerja bertambah, yang berdampak pada tidak dicabutnya status KEK.

"Sebelum mendapat izin itu, ada beberapa yang harus dilengkapi. Izin lingkungan hidup pelabuhan di KLHK, sebelum dapat izin itu juga harus ada izin kesesuaian ruang laut di Kementerian Kelautan.

Jadi, urutannya KKP mengeluarkan izin, lalu KLHK, nah baru lah ke Kemenhub. Ketika izin operasional pelabuhan berjalan, investor bisa *running*, kami terkendala ini ketika ingin mengembangkan," tegasnya.

"Pemprov sudah memproses di Kemendagri PT MBTK sebagai BUMD, tinggal aset, lalu infrastruktur tambahan kawasan industri bakal dilengkapi termasuk izin operasional pelabuhan, dan pengembangan pelabuhan dilakukan, sehingga investor melanjutkan investasi, *insya Allah* status KEK tidak dicabut," sambung Abi.

Pemerintah Daerah dan Perusda MBS yang memegang komitmen persyaratan-persyaratan untuk segera mengoperasionalkan KEK Maloy kini juga sedang berproses. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta kelonggaran dan dorongan kepada tiga kementerian terkait, sehingga Dewan KEK Nasional segera menerbitkan izin.

“Harapan kami segera terlaksanakan, memang butuh *effort* luar biasa. Dewan KEK sepakat untuk membantu percepatan (izin) itu. Dokumen sudah klir, hanya memang perlu dukungan, karena sedang berproses di kementerian,” pungkasnya. **(ril/uws)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Perizinan KEK Maloy Diberi Waktu 5 Bulan, Bakal Dicabut Karena Tak Ada Investasi, 27/02/24.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (PP 85/2014), Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan memiliki luas 557,34 ha (lima ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP 85/2014, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan terdiri atas:
 - a. Zona industri;
 - b. Zona logistik; dan
 - c. Zona pengolahan ekspor.